

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah SKPD (satuan kerja perangkat daerah) tingkat pemerintah provinsi yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y). Subyek dalam penelitian ini adalah pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan di masing-masing SKPD dengan masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner ke masing-masing SKPD tingkat pemerintah provinsi yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyebaran dan pengembalian kuesioner dilakukan mulai tanggal 10 November 2017 hingga 21 Desember 2017. Peneliti mengambil sampel pada 39 SKPD yang terdiri dari 1 sekretariat, 11 badan, 1 inspektorat, 1 RSUD, 1 satuan polisi pamong praja, 15 dinas, 7 biro, 1 DPRD, dan 1 komisi pemilihan umum. Jumlah tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Hasil Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentasi
Kuesioner yang dikirim	80	100%
Kuesioner yang kembali	80	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner kembali dan diolah	72	90%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	8	10%

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah kuesioner yang dikirim oleh peneliti berjumlah 80 buah kuesioner dan semua kuesioner tersebut kembali. Kuesioner yang kembali dan dapat diolah berjumlah 72 buah atau 90%, sedangkan kuesioner yang tidak dapat berjumlah 8 atau 10%.

Berikut ini akan disajikan data demografi responden mengenai informasi umum yang ditentukan, informasi tersebut antara lain :

1. Jenis Kelamin

Berikut ini dapat dilihat pembagian jenis kelamin responden yang diklasifikasikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi
1.	Laki – Laki	49	68,06%
2.	Perempuan	23	31,94%
Total		72	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa terdapat 72 responden yang terdiri dari 49 orang dengan jenis kelamin laki-laki atau 68,06 % dan 23 orang dengan jenis kelamin perempuan atau 31,94 %. Maka dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak didominasi oleh laki-laki.

2. Usia

Berikut ini akan disajikan tabel usia responden yang akan diklasifikasikan pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3
Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

No.	Keterangan	Frekuensi	Presentase
1.	20 – 24 tahun	11	15,28 %
2.	25 – 29 tahun	29	40,27 %
3.	30 – 34 tahun	20	27,78 %
4.	> 34 tahun	12	16,68 %
Total		72	100 %

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 20 – 24 tahun berjumlah 11 orang (15,28 %), sedangkan yang berusia 25 – 29 tahun berjumlah 29 orang (40,27 %). Responden yang berusia 30 – 34 tahun berjumlah 20 orang (27,78%) dan responden yang berusia > 34 tahun berjumlah 12 orang (16,68%). Maka dapat disimpulkan bahwa responden yang paling dominan dalam penelitian ini adalah yang berusia 25 – 29 tahun.

3. Pendidikan Terakhir

Berikut ini akan disajikan tabel pendidikan terakhir responden yang akan diklasifikasikan pada tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4
Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Keterangan	Frekuensi	Presentasi
1.	Diploma Tiga (D3)	23	31,94 %
2.	Strata Satu (S1)	42	58,3 %
3.	Strata Dua (S2)	7	9,73 %

No.	Keterangan	Frekuensi	Presentasi
4.	Strata Tiga (S3)	0	0 %
Total		72	100 %

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa responden yang memiliki pendidikan terakhir diploma tiga (D3) berjumlah 23 orang (31,94 %), selanjutnya untuk responden dengan pendidikan terakhir strata satu (S1) berjumlah 42 orang (58,33 %) sedangkan responden yang memiliki pendidikan terakhir strata dua (S2) berjumlah 7 orang (9,73 %) dan tidak ada responden yang berpendidikan akhir strata tiga (S3). Maka dapat disimpulkan bahwa responden yang paling dominan dalam penelitian ini adalah pegawai SKPD dengan pendidikan terakhir strata satu (S1).

4. Lama Bekerja di SKPD

Berikut akan disajikan tabel 4.5 mengenai lama bekerja responden di SKPD yang akan diklasifikasikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No.	Keterangan	Frekuensi	Presentase
1.	< 1 tahun	0	0 %
2.	1 – 5 tahun	32	44,5 %
3.	6 – 10 tahun	26	36,1 %
4.	> 10 tahun	14	19,4 %
Total		72	100 %

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun tidak ada, sedangkan responden yang memiliki masa kerja 1 – 5 tahun berjumlah 32 orang (44,5 %). Responden yang memiliki masa kerja 6 – 10 tahun berjumlah 26 orang (36,1 %) dan responden yang memiliki masa kerja diatas 10 tahun berjumlah 14 orang (19,4 %). Maka dapat disimpulkan bahwa responden yang paling dominan dalam penelitian ini adalah yang memiliki masa kerja 1 – 5 tahun.

B. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai rata-rata jawaban responden dalam menjawab pernyataan mengenai kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 4.6
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Std. Deviation	Kisaran Teoritis			Kisaran Aktual		
			Min	Max	Mean	Min	Max	Mean
Kualitas Sumber Daya Manusia	72	5,439	10	50	30	25	50	37,64
Pemanfaatan Teknologi Informasi	72	4,042	8	40	24	17	40	32,53
Pengendalian Intern Akuntansi	72	5,606	9	45	27	21	45	37,39
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	72	5,296	11	55	33	26	54	43,60

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Kisaran teoritis merupakan perkiraan nilai kisaran minimum dan maksimum total skor jawaban dari setiap variabel. Nilai kisaran minimum diperoleh dengan cara mengalikan total pernyataan dengan nilai jawaban terendah sedangkan nilai kisaran maksimum diperoleh dengan cara mengalikan total pernyataan dengan nilai jawaban tertinggi. Kisaran aktual merupakan nilai minimum dan maksimum dari total skor jawaban yang diperoleh dengan cara melakukan analisis statistik deskriptif.

Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 72 responden dalam penelitian ini. Variabel kualitas sumber daya manusia memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 50 dengan standar deviasi yang diperoleh sebesar 5,439. Kisaran aktual sebesar 25 – 50 dengan mean aktual sebesar 37,64. Nilai mean aktual sebesar 37,64 tersebut lebih mendekati nilai maksimum 50. Nilai mean aktual $>$ mean teoritis yaitu $37,64 > 30$ sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kualitas sumber daya manusia adalah tinggi.

Variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum 40 dengan standar deviasi 4,042. Kisaran aktual sebesar 17 – 40 dengan mean aktual sebesar 32,53. Nilai mean sebesar 32,53 lebih mendekati nilai maksimum 40. Nilai mean aktual $>$ mean teoritis yaitu sebesar $32,53 > 24$ sehingga dapat disimpulkan bahwa rata - rata pemanfaatan teknologi informasi adalah tinggi.

Variabel pengendalian intern akuntansi memiliki nilai minimum sebesar 9 dan nilai maksimum 45 dengan standar deviasi 5,606. Kisaran aktual sebesar 21 –

45 dengan mean aktual sebesar 37,39. Nilai mean aktual sebesar 37,39 lebih mendekati nilai maksimum 45. Nilai mean aktual $>$ mean teoritis yaitu sebesar $37,39 > 27$ sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengendalian intern akuntansi adalah tinggi.

Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum 55 dengan standar deviasi 5,296. Kisaran aktual sebesar 26 – 54 dengan mean aktual 43,60. Nilai mean aktual sebesar 43,60 lebih mendekati nilai maksimum 55. Nilai mean aktual $>$ mean teoritis yaitu sebesar $43,60 > 33$ sehingga, menunjukkan bahwa rata - rata kualitas laporam keuangan pemerintah daerah adalah tinggi.

C. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Uji Validitas Data

Uji validitas adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner yang ada di dalam penelitian. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan kuesioner (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan metode uji korelasi *Pearson Product Moment* atau yang biasa disebut *Pearson Correlation*.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas ini adalah apabila nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , maka item pernyataan dalam kuesioner dapat dikatakan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dapat dikatakan kuesioner tersebut valid. apabila nilai r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} , maka item

pernyataan dalam kuesioner tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dapat dikatakan kuesioner tersebut tidak valid.

Untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, pada kasus ini besarnya df dapat dihitung dengan cara 72 dikurangi 2 atau $df = 70$ dengan signifikansi 0,05 (5%) dan didapat r_{tabel} 0,232. jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai R positif, maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2011).

Hasil uji validitas untuk variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan dijelaskan pada tabel di bawah ini:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia (KSDM)

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Kualitas Sumber Daya Manusia

KSDM	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
KSDM 1	0,776	0,232	Valid
KSDM 2	0,656	0,232	Valid
KSDM 3	0,756	0,232	Valid
KSDM 4	0,695	0,232	Valid
KSDM 5	0,801	0,232	Valid
KSDM 6	0,730	0,232	Valid
KSDM 7	0,674	0,232	Valid
KSDM 8	0,654	0,232	Valid
KSDM 9	0,620	0,232	Valid
KSDM 10	0,809	0,232	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Dari hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa semua pernyataan pada variabel kualitas sumber daya manusia mempunyai nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua

pernyataan pada variabel kualitas sumber daya manusia adalah valid dan layak digunakan sebagai alat ukur.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi

PTI	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
PTI 1	0,593	0,232	Valid
PTI 2	0,733	0,232	Valid
PTI 3	0,845	0,232	Valid
PTI 4	0,801	0,232	Valid
PTI 5	0,578	0,232	Valid
PTI 6	0,601	0,232	Valid
PTI 7	0,841	0,232	Valid
PTI 8	0,799	0,232	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Dari hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa semua pernyataan pada variabel pemanfaatan teknologi informasi mempunyai nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan pada variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah valid dan layak digunakan sebagai alat ukur.

c. Pengendalian Intern Akuntansi (PIA)

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Pengendalian Intern Akuntansi

PIA	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
PIA 1	0,803	0,232	Valid
PIA 2	0,861	0,232	Valid
PIA 3	0,800	0,232	Valid
PIA 4	0,878	0,232	Valid
PIA 5	0,561	0,232	Valid
PIA 6	0,800	0,232	Valid
PIA 7	0,878	0,232	Valid

PIA	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
PIA 8	0,861	0,232	Valid
PIA 9	0,808	0,232	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Dari hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa semua pernyataan pada variabel pengendalian intern akuntansi mempunyai nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan pada variabel pengendalian intern akuntansi adalah valid dan layak digunakan sebagai alat ukur.

d. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD)

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

KLKPD	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
KLKPD 1	0,733	0,232	Valid
KLKPD 2	0,513	0,232	Valid
KLKPD 3	0,684	0,232	Valid
KLKPD 4	0,597	0,232	Valid
KLKPD 5	0,769	0,232	Valid
KLKPD 6	0,764	0,232	Valid
KLKPD 7	0,828	0,232	Valid
KLKPD 8	0,806	0,232	Valid
KLKPD 9	0,741	0,232	Valid
KLKPD 10	0,335	0,232	Valid
KLKPD 11	0,761	0,232	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Dari hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa semua pernyataan pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah valid dan layak digunakan sebagai alat ukur.

2. Uji Reliabilitas Data

Pengujian reliabilitas data dapat dilakukan setelah suatu instrumen penelitian dikatakan valid. Kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden stabil atau konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas dengan cronbach's alpha dengan taraf signifikan 5 %. Setiap item pernyataan dalam kuesioner dikatakan reliabel jika nilai cronbach's alpha lebih besar atau sama dengan 0,70 (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Berikut hasil uji reliabilitas variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas Data

No.	Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1.	Kualitas Sumber Daya Manusia	0,893	Reliabel
2.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,853	Reliabel
3.	Pengendalian Intern Akuntansi	0,933	Reliabel
4.	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,890	Reliabel

Sumber: data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa variabel kualitas sumber daya manusia memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,893, variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,853, variabel pengendalian intern akuntansi sebesar 0,933 dan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 0,890. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan

untuk 4 variabel di atas reliabel karena memiliki nilai Cronbach's Alpha yang lebih dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

D. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan pada data penelitian bertujuan agar tidak terjadi bias pada nilai estimator dari model yang digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari: uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan dalam penelitian untuk melihat data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Suatu model regresi dapat dikatakan baik apabila memiliki nilai residual yang baik (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.12:

Tabel 4.12
Hasil Pengujian Uji Normalitas

<i>One Kolmogorovsmirnov</i>	Nilai Sig.	Keterangan
Asymp.Sig (2-tailed)	0,094	Berdistribusi normal

Sumber: data primer yang diolah, 2017

Pada uji normalitas, data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi $> 0,05$. Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.14 diperoleh nilai signifikansi untuk uji satu sampel *Kolmogorov smirnov* sebesar 0,094. Nilai tersebut sudah lebih besar dari α atau 0,05, maka disimpulkan

bahwa residual berdistribusi normal. Dengan demikian, data pada penelitian ini dapat digunakan untuk pengujian statistik selanjutnya.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji model regresi dalam penelitian terjadi kolerasi antar variabel bebas. Penelitian ini menggunakan uji multikolinearitas dengan ketentuan jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 maka tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat ditabel 4.13:

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Collinierity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,994	1,006	Tidak terjadi Multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,743	1,346	Tidak terjadi Multikolinearitas
Pengendalian Intern Akuntansi	0,742	1.348	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: data primer yang diolah, 2017

Tabel 4.13 menjelaskan bahwa data tersebut tidak terkena multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai VIF yang secara keseluruhan dibawah dari 10 dan nilai tolerance secara keseluruhan diatas 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar masing-masing variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi dalam penelitian tidak terjadi ketidaksamaan varian antara yang satu

dengan yang lain. Penelitian ini menggunakan uji gletser dengan ketentuan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.14:

Tabel 4.14
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai sig	Keterangan
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,963	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,892	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pengendalian Intern Akuntansi	0,745	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: data primer yang diolah, 2017

Pada tabel 4.14 menunjukkan hasil semua variabel memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terkena heteroskedastisitas.

E. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

1. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi dapat digunakan untuk menjelaskan apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Hasil uji koefisien determinasi (*adjusted R²*) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefesien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,703 ^a	0,494	0,471	3,851

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,471 atau 47,1%. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi sebesar 47,1%. Sisanya sebesar 49,4 % dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Uji Nilai F

Uji nilai F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan mampu memengaruhi variabel dependen dalam tabel ANOVA (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Uji nilai F dilakukan dengan menggunakan kriteria, apabila p value (sig) < 0,05, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji nilai F dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.16
Hasil Uji Nilai F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	982,803	3	327,601	22,089	0,000 ^b
Residual	1008,516	68	14,831		
Total	1991,319	71			

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Hasil perhitungan pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai F sebesar 22,089 dengan nilai signifikan 0,000 atau $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji nilai t digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat nilai alpha dengan tingkat signifikansi 5 % (0,05). Kriteria hipotesis diterima apabila nilai sig $< 0,05$ dan koefisien regresi searah dengan hipotesis. Hasil uji nilai t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.17
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11,148	5,083		2,193	0,032
KSDM	0,029	0,084	0,029	0,339	0,736
PTI	0,504	0,131	0,385	3,843	0,000
PIA	0,400	0,095	0,424	4,231	0,000

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Pada tabel 4.17 dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda yang diperoleh:

$$KLKPD = 11,148 + 0,029 \text{ KSDM} + 0,504 \text{ PTI} + 0,400 \text{ PIA} + e$$

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H₁)

Variabel kualitas sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi 0,736 > α 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis pertama ditolak.

b. Pengujian Hipotesis Kedua (H₂)

Variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki koefisien 0,504 dengan nilai signifikansi 0,000 < α 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis kedua diterima.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga (H₃)

Variabel pengendalian intern akuntansi memiliki koefisien 0,400 dengan nilai signifikansi 0,000 < α 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis ketiga diterima.

Tabel 4.18
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

KODE	Hipotesis	Keterangan
H ₁	Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Ditolak
H ₂	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Diterima

KODE	Hipotesis	Keterangan
H ₃	Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Diterima

F. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian empiris yang telah dilakukan pada beberapa hipotesis dalam penelitian dibahas pada bagian berikut ini:

1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dikatakan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang juga berkualitas, karena sumber daya manusia yang berkualitas memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memaksimalkan kinerjanya dalam menghasilkan keluaran (*output*) secara efisien dan efektif. Akan tetapi hasil penelitian ini justru menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut peneliti, Hal ini disebabkan karena dalam menyusun suatu laporan keuangan pemerintah daerah, setiap pegawai telah diberikan suatu prosedur langkah demi

langkah yang dibuat secara rinci dimana prosedur tersebut sudah teruji dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang mana tentunya prosedur ini mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan.

Adapun hal lain yang menyebabkan tidak diperlukannya sumber daya manusia yang berkualitas dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas adalah karena tersedianya dukungan dari teknologi informasi yang mampu mempermudah proses penyusunan laporan keuangan serta penerapan pengendalian intern yang mampu mencegah kesalahan-kesalahan yang mampu merusak kualitas dari sebuah laporan keuangan. Ketika suatu sistem berbentuk prosedur yang kuat telah dibentuk dengan baik dan dibantu dengan kemudahan dan pengawasan dari teknologi informasi dan pengendalian intern, maka sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi tidak lagi diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Karena pada dasarnya sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi lebih dibutuhkan ketika prosedur, sistem, teknologi dan pengendalian belum mampu memberi dukungan secara penuh.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2012); Yeny *et al.* (2016); Firdaus *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Sari (2014); Alimbudiono dan Fidelis (2004); Winidyaningrum dan Rahmawati (2010);

Desmiyawati (2014); Ariesta (2013) serta Andriani (2010) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa memanfaatkan teknologi informasi dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan tersebut.

Teknologi Informasi ini dapat dioperasikan dengan menggunakan seperangkat komputer. Alat bantu tersebut berperan sebagai pengolah data yang mampu mendapatkan, menyusun, memproses, menyimpan, dan mengelompokkan data lebih baik dari yang manusia mampu lakukan. Teknologi informasi juga berfungsi sebagai media penyebar data yang bertujuan agar masyarakat luas dapat lebih mudah mengaksesnya. Adapun manfaat lainnya dari penggunaan teknologi informasi pada SKPD adalah untuk mempersingkat suatu proses penyelesaian laporan keuangan dengan cara melipatgandakan kinerja manusia dan mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak mampu dilakukan manusia.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Sari (2014); Winidyaningrum dan Rahmawati (2010); Ariesta (2013); dan Desmiyawati (2014) yang menyatakan bahwa pemanfaatan

teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Pramudiarta (2015) dan Prapto (2010) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

3. Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dengan menggunakan pengendalian intern yang baik maka laporan keuangan yang berkualitas akan dapat dihasilkan.

Pengendalian intern akuntansi memiliki peran sebagai pengarah, pengukur dan pengawas yang juga berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan yang mungkin terjadi dalam penyusunan laporan keuangan. Pengendalian intern akuntansi pada dasarnya terdiri dari sekumpulan kebijakan dan prosedur yang secara khusus disusun untuk menjamin berjalannya suatu kegiatan dan ditaatinya suatu peraturan yang berlaku agar efisiensi dalam pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan.

Adapun contoh peran dari pengendalian intern akuntansi adalah pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara setiap unit yang ada di dalam organisasi, pengelompokan dokumen, penggunaan catatan dan berkas – berkas dengan kode tertentu, pembuatan otorisasi yang mendukung atas

transaksi yang ada, pemeriksaan berkala dari pihak ketiga yang independen dan penerapan rekam jejak audit yang baik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Setiawati dan Sari (2014); Ariesta (2013); Desmiyawati (2014) dan Indriasari (2008) yang menyatakan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Malle (2013) yang menyatakan bahwa pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.